

**KONSTRUKSI NARASI KRISIS DALAM KOMUNIKASI POLITIK
GERAKAN MAHASISWA: ANALISIS FRAMING BEM UI PADA AKSI
MENUJU INDONESIA BANGKRUT TAHUN 2026**

Dia Puspitasari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dia_puspita@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Gerakan mahasiswa secara historis memiliki posisi strategis sebagai agen kontrol sosial dan kekuatan moral dalam demokrasi Indonesia. Pada Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menginisiasi aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" yang mengangkat isu kondisi ekonomi nasional, pengelolaan anggaran negara, serta arah kebijakan pemerintah. Narasi "Indonesia Bangkrut" menjadi menarik untuk dikaji karena merepresentasikan konstruksi simbolik yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kondisi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana BEM UI membingkai (framing) isu krisis ekonomi dan politik melalui komunikasi politik yang disebarluaskan dalam berbagai platform digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama: define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Data penelitian diperoleh dari pernyataan resmi, poster aksi, unggahan media sosial, serta pemberitaan mengenai aksi "Menuju Indonesia Bangkrut". Hasil konseptual penelitian menunjukkan bahwa BEM UI membangun narasi krisis melalui konstruksi simbolik yang menempatkan pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab atas memburuknya kondisi ekonomi dan demokrasi. Framing tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kritik kebijakan, tetapi juga sebagai strategi mobilisasi politik untuk membangun solidaritas publik dan meningkatkan partisipasi warga dalam ruang demokrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik gerakan mahasiswa di era digital semakin mengandalkan strategi framing yang bersifat emosional, simbolik, dan viral dalam membentuk opini publik.

Kata Kunci: *Komunikasi Politik; Framing; Gerakan Mahasiswa; BEM UI; Krisis Ekonomi; Media Digital*

ABSTRACT

Student movements have historically occupied a strategic position as agents of social control and moral forces within Indonesia's democratic system. In June 2026, the Student Executive Board of the University of Indonesia (BEM UI) initiated a protest movement entitled "*Towards a Bankrupt Indonesia*", raising concerns regarding the national economic condition, state budget management, and the direction of government policies. The narrative of "*Bankrupt Indonesia*" is particularly significant because it represents a symbolic construction capable of influencing public perceptions of the state's socio-political and economic conditions. This study aims to examine how BEM UI framed the issues of

economic and political crisis through political communication disseminated across various digital platforms. Employing a qualitative approach, the study utilizes Robert N. Entman's framing analysis, which consists of four analytical dimensions: defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and suggesting remedies. The data sources include official statements, protest posters, social media content, and media reports related to the "*Towards a Bankrupt Indonesia*" movement. The conceptual findings indicate that BEM UI constructed a crisis narrative through symbolic representations that positioned the government as the primary actor responsible for the perceived deterioration of economic conditions and democratic governance. This framing functioned not only as a form of policy criticism but also as a political mobilization strategy aimed at fostering public solidarity and encouraging civic participation in democratic spaces. The study further demonstrates that political communication within contemporary student movements increasingly relies on emotional, symbolic, and viral framing strategies to shape public opinion in the digital era.

Keywords: *Political Communication; Framing; Student Movement; BEM UI; Crisis Narrative; Digital Activism; Public Opinion.*

A. PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan proses pertukaran pesan yang bertujuan memengaruhi sikap, perilaku, dan orientasi politik masyarakat. Dalam sistem demokrasi, komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh negara dan partai politik, tetapi juga oleh kelompok masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa. Sebagai salah satu elemen masyarakat sipil, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menyampaikan kritik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta membangun ruang diskursus publik mengenai berbagai persoalan kebangsaan. Mahasiswa di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik nasional, mulai dari gerakan tahun 1966, 1974, 1998 hingga berbagai gerakan advokasi kebijakan pada era reformasi. Berbagai momentum tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai kelompok intelektual, tetapi juga sebagai aktor politik yang mampu memengaruhi agenda publik dan proses pengambilan kebijakan. Dalam perspektif komunikasi politik, gerakan mahasiswa dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi kolektif yang bertujuan membangun kesadaran publik terhadap isu-isu yang dianggap penting bagi kepentingan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik mahasiswa dari yang semula berbasis mobilisasi fisik menjadi kombinasi antara aksi jalanan dan kampanye digital. Media sosial seperti Instagram, X, TikTok, dan YouTube telah menjadi instrumen utama dalam membangun narasi politik, menyebarkan informasi, serta menggalang dukungan publik. Menurut laporan *Digital 2025 Indonesia*, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 220 juta pengguna dengan tingkat penetrasi internet mencapai lebih dari 79 persen dari total populasi. Kondisi tersebut menjadikan ruang digital sebagai arena strategis dalam pertarungan narasi politik dan pembentukan opini publik. Dalam konteks tersebut, pada 12 Juni 2026 Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Indonesia (BEM UI) menginisiasi aksi bertajuk “*Menuju Indonesia Bangkrut*” yang berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Gerakan tersebut mengangkat berbagai isu seperti pengelolaan anggaran negara, kenaikan harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), beban utang negara, efektivitas program pemerintah, serta kualitas demokrasi. Melalui slogan “*Menuju Indonesia Bangkrut*”, BEM UI berupaya membangun perhatian publik terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan.

Penggunaan istilah “*bangkrut*” dalam komunikasi politik menjadi menarik untuk dikaji karena istilah tersebut secara ekonomi merujuk pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial, tetapi dalam konteks gerakan sosial digunakan sebagai metafora politik yang merepresentasikan persepsi krisis. Pilihan diksi tersebut menunjukkan adanya strategi framing yang bertujuan menyederhanakan persoalan ekonomi dan politik yang kompleks menjadi pesan yang lebih mudah dipahami, diingat, dan disebarluaskan oleh masyarakat. Dalam perspektif Entman (1993), framing merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas sehingga membentuk definisi masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, serta rekomendasi penyelesaian atas suatu isu. Narasi krisis memiliki daya tarik politik yang kuat karena mampu membangkitkan respons emosional publik sekaligus meningkatkan urgensi terhadap suatu masalah. Dalam era media digital, narasi semacam ini cenderung lebih mudah menjadi viral karena mengandung unsur dramatik, konflik, dan kedekatan dengan pengalaman masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, slogan “*Menuju Indonesia Bangkrut*” tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk kritik kebijakan, tetapi juga sebagai strategi komunikasi politik yang dirancang untuk membangun resonansi publik dan memobilisasi partisipasi politik warga negara.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa framing yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik dan legitimasi politik suatu gerakan. Namun demikian, sebagian besar penelitian komunikasi politik di Indonesia masih berfokus pada framing yang dilakukan oleh media massa, elite politik, atau partai politik. Kajian mengenai bagaimana organisasi mahasiswa membangun narasi krisis melalui media digital masih relatif terbatas, terutama dalam konteks gerakan mahasiswa pasca-transformasi digital. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian mengenai konstruksi narasi krisis yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa dalam ruang komunikasi politik kontemporer. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BEM UI membingkai narasi krisis melalui aksi “*Menuju Indonesia Bangkrut*” dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana gerakan mahasiswa mengonstruksi makna, memproduksi pesan politik, serta membangun pengaruh dalam ruang publik digital di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang semakin kompleks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk

menganalisis konstruksi narasi krisis dalam komunikasi politik yang dibangun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melalui aksi bertajuk "*Menuju Indonesia Bangkrut*" tahun 2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam pesan-pesan politik yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi, baik dalam bentuk pernyataan resmi, poster aksi, unggahan media sosial, maupun pemberitaan media massa. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menginterpretasikan bagaimana suatu realitas sosial dikonstruksi dan dipresentasikan kepada publik melalui proses framing.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai materi komunikasi yang diproduksi oleh BEM UI terkait aksi "*Menuju Indonesia Bangkrut*", seperti poster digital, siaran pers, pernyataan resmi organisasi, unggahan media sosial Instagram dan X, serta dokumentasi visual yang beredar di ruang publik digital. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan komunikasi politik, teori framing Robert N. Entman, gerakan sosial digital, serta penelitian terdahulu yang membahas konstruksi narasi dalam gerakan mahasiswa dan media digital.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing Robert N. Entman. Model framing Entman dipilih karena mampu mengidentifikasi bagaimana suatu isu dikonstruksi dan disajikan kepada publik melalui proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas sosial. Analisis framing dilakukan melalui empat elemen utama. Pertama, *define problems* (pendefinisian masalah), yaitu mengidentifikasi bagaimana BEM UI mendefinisikan kondisi yang dianggap sebagai persoalan atau krisis. Kedua, *diagnose causes* (identifikasi penyebab masalah), yaitu menganalisis pihak atau faktor yang dikonstruksi sebagai penyebab munculnya persoalan tersebut. Ketiga, *make moral judgment* (penilaian moral), yaitu mengkaji nilai-nilai moral yang digunakan untuk menilai aktor, kebijakan, atau situasi yang menjadi objek kritik. Keempat, *treatment recommendation* (rekomenasi penyelesaian), yaitu mengidentifikasi solusi atau tindakan yang ditawarkan oleh BEM UI sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dikonstruksikan.

Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana narasi "*Indonesia Bangkrut*" dibangun sebagai strategi komunikasi politik untuk membentuk persepsi publik, memobilisasi dukungan masyarakat, serta mengartikulasikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan framing Entman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik komunikasi politik gerakan mahasiswa dalam ruang publik digital dan kontribusinya terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Narasi Krisis dalam Gerakan "*Menuju Indonesia Bangkrut*"

Gerakan "*Menuju Indonesia Bangkrut*" yang diinisiasi oleh BEM UI pada Juni 2026 menunjukkan bagaimana organisasi mahasiswa memanfaatkan komunikasi politik sebagai instrumen untuk membangun persepsi publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional. Dalam konteks ini, slogan

“Indonesia Bangkrut” tidak dapat dipahami secara literal sebagai kondisi ekonomi negara yang mengalami kebangkrutan sebagaimana definisi dalam ilmu ekonomi, melainkan sebagai konstruksi simbolik yang digunakan untuk menggambarkan akumulasi berbagai persoalan yang dipersepsikan mengancam keberlanjutan tata kelola negara. Dalam perspektif komunikasi politik, bahasa memiliki fungsi strategis sebagai alat pembentukan realitas sosial.

Pemilihan istilah “*bangkrut*” menunjukkan adanya upaya penyederhanaan isu-isu kompleks menjadi simbol yang mudah dipahami oleh publik. Strategi semacam ini sejalan dengan pandangan Entman (1993) bahwa framing merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas sehingga menghasilkan definisi masalah yang lebih mudah diterima oleh khalayak. Melalui slogan tersebut, BEM UI tidak hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa persoalan ekonomi dan demokrasi yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai situasi yang mendesak dan membutuhkan perhatian publik secara luas. Dengan demikian, narasi krisis berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik yang mampu menciptakan rasa urgensi sekaligus memobilisasi partisipasi masyarakat.

Define Problems: Krisis sebagai Realitas yang Dikonstruksi

Berdasarkan analisis terhadap berbagai materi komunikasi yang diproduksi oleh BEM UI, ditemukan bahwa organisasi tersebut mendefinisikan masalah utama sebagai kondisi krisis multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas demokrasi. Dalam berbagai poster dan pernyataan publik, persoalan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok atau tekanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut pengelolaan anggaran negara, efektivitas kebijakan pemerintah, serta posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, krisis yang dikonstruksi tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat multidimensional. Menariknya, BEM UI tidak menggunakan istilah-istilah teknokratis yang lazim digunakan dalam diskursus ekonomi seperti inflasi, defisit fiskal, atau rasio utang terhadap produk domestik bruto. Sebaliknya, mereka memilih istilah yang lebih emosional dan simbolik, yakni “*bangkrut*”.

Pilihan bahasa tersebut menunjukkan adanya strategi komunikasi yang bertujuan memperluas jangkauan pesan kepada masyarakat umum. Dalam konteks framing, penggunaan istilah “*bangkrut*” berfungsi sebagai perangkat simbolik yang memperkuat persepsi bahwa negara sedang menghadapi ancaman serius. Dengan demikian, yang menjadi fokus bukan lagi perdebatan mengenai validitas indikator ekonomi, melainkan bagaimana publik memaknai kondisi negara melalui simbol krisis yang dibangun oleh gerakan mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa proses *define problems* dalam gerakan mahasiswa tidak hanya berfungsi menjelaskan realitas, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui produksi makna. Dengan kata lain, krisis dalam konteks ini merupakan hasil konstruksi komunikasi politik yang dirancang untuk memperoleh perhatian publik.

Diagnose Causes: Pemerintah sebagai Aktor Sentral dalam Narasi Krisis

Tahap kedua dalam model framing Entman adalah *diagnose causes*, yaitu proses identifikasi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas munculnya suatu

persoalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa BEM UI secara konsisten mengarahkan perhatian publik kepada pemerintah sebagai aktor utama yang diposisikan sebagai penyebab munculnya krisis. Berbagai persoalan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, pengelolaan anggaran negara, hingga kualitas demokrasi dikaitkan dengan keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Dalam framing yang dibangun, persoalan ekonomi tidak direpresentasikan sebagai akibat dari dinamika global semata, melainkan sebagai konsekuensi dari pilihan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab atas kondisi yang terjadi dipersonifikasikan pada institusi pemerintah sebagai pemegang otoritas politik.

Strategi ini memiliki implikasi penting dalam komunikasi politik. Ketika penyebab masalah dipusatkan pada aktor tertentu, publik akan lebih mudah mengidentifikasi siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Proses ini memperkuat fungsi gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang berupaya menciptakan akuntabilitas politik. Dari perspektif teori framing, proses identifikasi penyebab merupakan bagian penting dalam pembentukan opini publik. Masyarakat cenderung memahami suatu isu berdasarkan aktor yang ditampilkan sebagai penyebab masalah. Oleh karena itu, framing yang dilakukan BEM UI tidak hanya menjelaskan kondisi yang terjadi, tetapi juga mengarahkan persepsi publik mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Make Moral Judgment: Mahasiswa sebagai Representasi Kepentingan Publik

Elemen ketiga dalam model Entman adalah *make moral judgment*, yaitu proses pemberian penilaian moral terhadap situasi dan aktor yang terlibat dalam suatu isu. Analisis menunjukkan bahwa BEM UI membangun dikotomi moral antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konstruksi tersebut, mahasiswa diposisikan sebagai representasi kepentingan rakyat yang berupaya memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi, sementara pemerintah direpresentasikan sebagai pihak yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawab politiknya secara optimal. Strategi moralisasi semacam ini merupakan karakteristik umum dalam komunikasi politik gerakan sosial. Gerakan mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik berbasis data atau argumentasi rasional, tetapi juga menggunakan bahasa moral untuk membangun legitimasi gerakan.

Narasi mengenai penderitaan masyarakat, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap demokrasi menjadi dasar moral yang digunakan untuk membenarkan aksi kolektif. Dalam konteks ini, aksi demonstrasi tidak diposisikan sebagai bentuk oposisi politik semata, melainkan sebagai kewajiban moral untuk menjaga kepentingan publik. Framing moral tersebut berfungsi memperkuat legitimasi gerakan sekaligus membangun solidaritas sosial di antara kelompok masyarakat yang memiliki keresahan serupa. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik gerakan mahasiswa tidak hanya beroperasi pada tingkat rasional, tetapi juga pada tingkat simbolik dan emosional. Nilai-nilai moral digunakan sebagai sumber legitimasi yang memungkinkan gerakan memperoleh dukungan yang lebih luas.

Treatment Recommendation: Demonstrasi sebagai Instrumen Perubahan Politik

Tahap terakhir dalam framing Entman adalah *treatment recommendation*, yaitu rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan terhadap persoalan yang dikonstruksi. BEM UI menawarkan sejumlah solusi yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pemerintah, pengelolaan anggaran negara yang lebih transparan, perlindungan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi. Namun yang menarik, solusi tersebut tidak hanya disampaikan dalam bentuk tuntutan kebijakan, melainkan juga melalui ajakan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dalam framing ini, demonstrasi diposisikan sebagai instrumen demokrasi yang sah untuk mendorong perubahan kebijakan.

Partisipasi publik dipandang sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara. Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak hanya membangun narasi mengenai masalah, tetapi juga mengonstruksi partisipasi politik sebagai solusi. Strategi tersebut menunjukkan bahwa framing tidak berhenti pada tahap kritik, tetapi juga berfungsi sebagai alat mobilisasi sosial. Gerakan mahasiswa berupaya mengubah audiens dari sekadar penerima informasi menjadi aktor yang terlibat dalam proses politik.

Narasi Krisis sebagai Strategi Komunikasi Politik Digital

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa narasi “*Indonesia Bangkrut*” merupakan bentuk komunikasi politik yang dirancang untuk menghasilkan resonansi publik yang tinggi di era digital. Penggunaan istilah yang provokatif, emosional, dan mudah diingat memungkinkan pesan politik menyebar secara cepat melalui media sosial. Fenomena ini sejalan dengan konsep *networked social movements* yang dikemukakan oleh Manuel Castells, di mana gerakan sosial kontemporer semakin bergantung pada jaringan komunikasi digital dalam membangun dukungan publik. Media sosial tidak hanya menjadi saluran distribusi informasi, tetapi juga ruang produksi makna politik.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan suatu gerakan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah massa yang hadir di jalan, tetapi juga oleh kemampuannya membangun narasi yang mampu mendominasi percakapan publik. Narasi “*Indonesia Bangkrut*” menunjukkan bagaimana simbol krisis digunakan sebagai alat komunikasi politik untuk menciptakan perhatian, memperluas jangkauan pesan, dan membentuk opini publik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik gerakan mahasiswa pada era digital mengalami transformasi dari pola mobilisasi konvensional menuju politik narasi (*politics of narrative*). Kekuatan utama gerakan tidak lagi semata-mata terletak pada aksi fisik di ruang publik, tetapi pada kemampuan membangun makna, mengelola simbol, dan mengonstruksi persepsi publik melalui strategi framing yang efektif.

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan “*Menuju Indonesia Bangkrut*” yang diinisiasi oleh BEM UI merupakan bentuk komunikasi politik yang secara strategis membangun narasi krisis untuk mengartikulasikan kritik terhadap kondisi

ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui analisis framing Robert N. Entman, ditemukan bahwa BEM UI mengonstruksi berbagai persoalan nasional sebagai suatu kondisi krisis yang memerlukan perhatian publik secara luas. Narasi “*Indonesia Bangkrut*” digunakan bukan dalam makna ekonomi yang bersifat literal, melainkan sebagai simbol politik yang merepresentasikan keresahan terhadap arah kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses *define problems*, BEM UI membingkai kondisi Indonesia sebagai negara yang sedang menghadapi persoalan multidimensional, baik dalam aspek ekonomi maupun demokrasi. Pada tahap *diagnose causes*, berbagai persoalan tersebut dikaitkan dengan kebijakan dan keputusan politik pemerintah yang dianggap tidak efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pada tahap *make moral judgment*, mahasiswa diposisikan sebagai representasi kepentingan publik yang memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Sementara itu, pada tahap *treatment recommendation*, demonstrasi dan partisipasi publik dikonstruksikan sebagai instrumen demokratis untuk mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi politik gerakan mahasiswa di era digital semakin mengandalkan strategi framing yang bersifat simbolik, emosional, dan mudah disebarluaskan melalui media sosial. Narasi krisis yang dibangun BEM UI tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kritik politik, tetapi juga sebagai strategi mobilisasi yang bertujuan membangun solidaritas sosial, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta memperluas partisipasi warga dalam ruang publik demokratis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kekuatan gerakan mahasiswa kontemporer tidak hanya terletak pada aksi kolektif di ruang fisik, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam mengonstruksi makna dan membentuk opini publik melalui komunikasi politik digital.

Penelitian ini menyarankan agar kajian mengenai komunikasi politik gerakan mahasiswa di Indonesia terus dikembangkan, khususnya dalam konteks penggunaan media digital sebagai sarana produksi dan penyebaran narasi politik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan strategi framing yang digunakan oleh berbagai organisasi mahasiswa di Indonesia dalam merespons isu-isu nasional yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengkaji bagaimana respons publik terhadap narasi yang dibangun oleh gerakan mahasiswa melalui analisis komentar media sosial, analisis sentimen, maupun studi resepsi khalayak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu kasus gerakan mahasiswa, yaitu aksi “*Menuju Indonesia Bangkrut*” yang diinisiasi oleh BEM UI. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh praktik komunikasi politik seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis framing terhadap pesan yang diproduksi oleh organisasi mahasiswa tanpa mengukur secara langsung pengaruh narasi tersebut terhadap perubahan opini publik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengombinasikan analisis framing

dengan pendekatan kuantitatif atau studi khalayak untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas komunikasi politik gerakan mahasiswa dalam membentuk persepsi masyarakat dan dinamika demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age* (2nd ed.). Polity Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dahlgren, P. (2013). *The political web: Media, participation and alternative democracy*. Palgrave Macmillan.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2018). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- McNair, B. (2018). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2023). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Neuman, W. R., Just, M. R., & Crigler, A. N. (1992). *Common knowledge: News and the construction of political meaning*. University of Chicago Press.
- Norris, P. (2000). *A virtuous circle: Political communications in postindustrial societies*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Tufte, T. (2017). *Communication and social change: A citizen perspective*. Polity Press.
- Waisbord, S. (2018). The elective affinity between post-truth communication and populist politics. *Communication Research and Practice*, 4(1), 17–34.
<https://doi.org/10.1080/22041451.2018.1428928>
- Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2014). *Mass media research: An introduction* (10th ed.). Cengage Learning.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. (2026). *Pernyataan resmi aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”* [Dokumen organisasi].
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. (2026). *Poster dan materi kampanye digital aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”* [Arsip media sosial].
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. (2026). *Unggahan Instagram terkait aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”* [Media sosial].

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2025*.
- DataReportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*.
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Networking democracy? Social media innovations in participatory politics. *Information, Communication & Society*, 14(6), 757–769.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648>